

Yang terhormat  
Proyek Manager PT. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund  
Proyek Manager PT. Indonesia Infrastructure Financing Facility  
Kalpana Seethepalli  
Team Leader, PT. IIGF project  
[kseethepalli@worldbank.org](mailto:kseethepalli@worldbank.org)  
Sarvesh Suri  
Regional Manager, IFC  
Indonesia Country Manager, Jakarta  
[SSuri1@ifc.org](mailto:SSuri1@ifc.org)  
Kantor Bank Dunia (WB) dan International Finance Corporation (IFC)  
Di Jakarta

Kami menyampaikan surat ini dengan maksud mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai investasi, pinjaman dan dukungan lain dari Bank Dunia dan IFC terhadap pembangunan proyek infrastruktur maupun lembaga pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, kami akan berkunjung ke kantor Anda pada 2 September 2015.

Kami berharap dapat diterima atau bertemu langsung dengan Project Manager Infrastruktur Bank Dunia dan IFC termasuk otoritas yang bertanggungjawab terhadap proyek Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund/IIGF*) dan Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Financing Facility/IIFF*) serta para staf ahli yang bias mengambil keputusan atau menangani langsung urusan safeguards untuk proyek-proyek infrastruktur maupun sub-proyek infrastruktur yang terkait.

*Nota bene: kami berhap ketemu langsung dengan project managers dan pengambil keputusan, dan bukan dengan staf dari kantor Komunikasi, HuMas, maupun Kantor NGO di ADB.*

Kami sangat berharap bahwa tanggal 2 September 2015 adalah waktu yang cocok bagi Anda untuk bertemu dengan kami.

## **Latarbelakang**

PT IIF didirikan oleh pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)<sup>1</sup> yang bekerjasama dengan *Asian Development Bank (ADB)*, *International Finance Corporation (IFC)*, dan *Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)*. Dengan adanya perusahaan pembiayaan (PT IIF) dan perusahaan

---

<sup>1</sup> PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

penjaminan infrastruktur (PT PII/IIGF), pada 2010 Presiden SBY kemudian meningkatkan jumlah pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) yang direncanakan di luar Jawa-Bali menjadi tigapuluh dua unit. Pada tahun yang sama pemerintah mengumumkan fase kedua program ini yaitu, Fast Track Program II (FTP II)<sup>2</sup> yang membangun 42 PLTU Batubara (3.312 MW), 43 PLTP/geothermal (4.007 MW), 3 PLTA (1.204 MW), dan 4 PLTG/PLTGU (1.660 MW)<sup>3</sup>

Mencermati perkembangan tersebut, menyadari atas potensi dampak terhadap lingkungan hidup (termasuk hutan) dan masyarakat -- dan mengingat bahwa World Bank Group telah memberikan sejumlah fasilitas pinjaman proyek maupun kebijakan yang terkait dengan infrastruktur di Indonesia dan IFC, kerja sama dengan Standard Chartered Bank dan Deutsche Bank, menyiapkan pinjaman \$250 juta untuk PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) in 2014,<sup>4</sup> -- maka kami ingin mendapatkan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Proyek dan subproyek infrastruktur apa saja yang telah atau didanai atau terkait dengan World Bank Group, terutama yang menggunakan dukungan PT IIGF dan PT IIF dengan pendekatan public private partnership (PPP) dan/atau financial intermediaries (FI), terutama menyangkut:
  - a. Daftar subproyek PT IIGF dan PT IIF;
  - b. Dokumen2 analisa lingkungan hidup dan dampak social, termasuk Amdal, EIA, EA, Indigenous Peoples Plan, Resettlement Plan yang berhubungan dengan PT. IIGF dan PT IIF;
  - c. Operations Manual dari PT IIGF dan PT IIF;
  - d. Laporan berbagai konsultasi publik untuk proyek PT IIGF dan PT IIF, termasuk sub-broyeknya; daftar NGO dan masyarakat yang dilibatkan dalam proses konsultasi untuk pendirian PT IIGF dan PT IIF maupun untuk assessment sub-proyeknya masing-masing.
  - e. Informasi tentang pemenuhan prasyarat safeguards dan/atau pelanggaran safeguards, sert masalah lain seperti korupsi dalam proyek dan sub-proyek tersebut.
  
2. Pemerintah Indonesia menyebutkan hanya mampu menyediakan dana 22% di dalam APBN 2015 untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur yang diperkirakan akan membutuhkan dana diatas Rp 600 trilyun. Apakah saat ini sudah ada rencana dari World Bank Group untuk menyediakan dana infrastruktur lain, termasuk untuk PT IIGF, PT IIF maupun melalui jalur, proyek, maupun investasi lain.

---

<sup>2</sup> Lihat Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 yang menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait.

<sup>4</sup>[http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region\\_\\_ext\\_content/regions/east+asia+and+the+pacific/countries/ifc+in+indonesia](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/east+asia+and+the+pacific/countries/ifc+in+indonesia)

3. Kami juga mencari informasi tentang rencana BD dan IFC, melalui PT IIGF, PT IIF maupun jalur lain untuk kerjasama Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Indonesia.

Sangat membantu apabila informasi diatas bisa dikirimkan kepada kami sebelum pertemuan kita pada bulan September.

Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Anda.

Jakarta 21 Augustus 2015

1. Uli Parulian - Indonesia Legal Resources Center (ILRC)
2. Zenzi Suhadi – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
3. Franky Samperante – Yayasan Pusaka
4. Rio Ismail - The Ecological Justice
5. Rivani Noor – Cappa
6. Wiwin – TUK Indonesia
7. Riza V. Tjahjadi – Biotani Bahari Indonesia
8. Stephanie Fried – Ulu Foundation
9. Abdul Halim – KIARA